



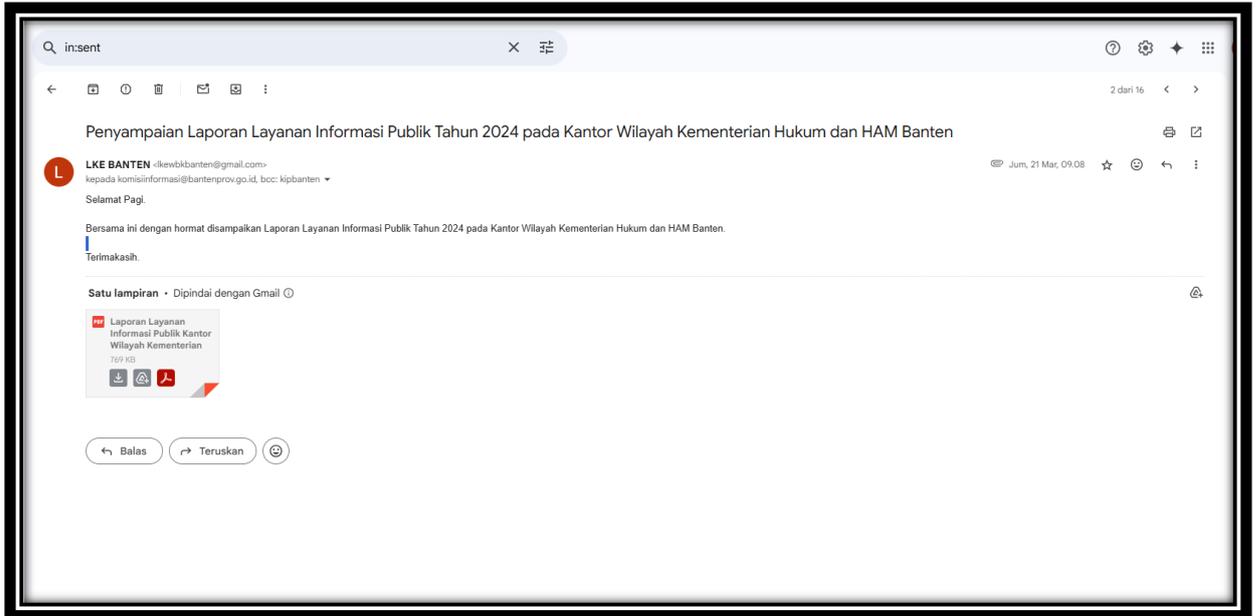
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

Jalan Brigjen K.H. Sam'un No.44 D Kota Serang 42112

Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210

Laman: <https://banten.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwil.banten@kemenkum.go.id

Dokumentasi Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024





ANNUAL REPORT

Laporan Layanan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BANTEN

Jalan Brigjen K.H. Sam'un No.44 D Kota Serang 42112

Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210

Laman: <https://banten.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwil.banten@kemenkum.go.id

**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
TAHUN 2024**

A. Pendahuluan

1. Umum

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Saat ini fungsi Kehumasan atau Layanan Informasi Publik berada dalam kewenangan Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Secara khusus, fungsi layanan tersebut berada di Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terus

meningkatkan kualitas di berbagai aspek Layanan Informasi Publik seperti: regulasi internal, peningkatan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia serta menghadirkan inovasi-inovasi guna peningkatan Layanan Informasi Publik.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari layanan informasi publik adalah:

- a. Menjamin keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas badan publik
- b. Memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat
- c. Memfasilitasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kegiatan ini adalah pelayanan informasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten yang menurut jenisnya merupakan Lembaga Negara Non Struktural/vertikal berlokasi di jalur strategis berdekatan dari pusat pemerintahan Kota Serang dalam rentang pelaksanaan di Periode Tahun 2025.

4. Dasar Pelaksanaan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018. Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Saat ini fungsi Kehumasan atau Layanan Informasi Publik berada dalam kewenangan Kepala Bagian T pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Secara khusus, fungsi layanan tersebut berada di Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terus meningkatkan kualitas di berbagai aspek Layanan Informasi

Publik seperti: regulasi internal, peningkatan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia serta menghadirkan inovasi-inovasi guna peningkatan Layanan Informasi Publik. Pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten meliputi:

1. Sarana dan Prasarana

Untuk pelayanan kedatangan langsung/tatap muka, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menyediakan prasarana berupa:

SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
Meja Layanan Informasi dan Pengaduan	1 unit
Kursi	3 unit
Brosur Layanan	1 pack
Banner Pelayanan Publik	4 unit
Kotak Saran	1 unit
Maklumat Pelayanan	1 unit
Panduan Alur Pelayanan Publik	2 buah
Layar Informasi Layanan Digital	2 buah
Layar Penilaian Kepuasan Masyarakat	1 buah

Tabel 1. Data Sarana dan Prasarana

Selain menerima pelayanan secara langsung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi juga menerima Layanan Informasi Publik maupun Layanan Hukum dan HAM melalui media sebagai berikut:



Gambar 1. Media Layanan Informasi Publik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten membangun layanan berbasis digital melalui:

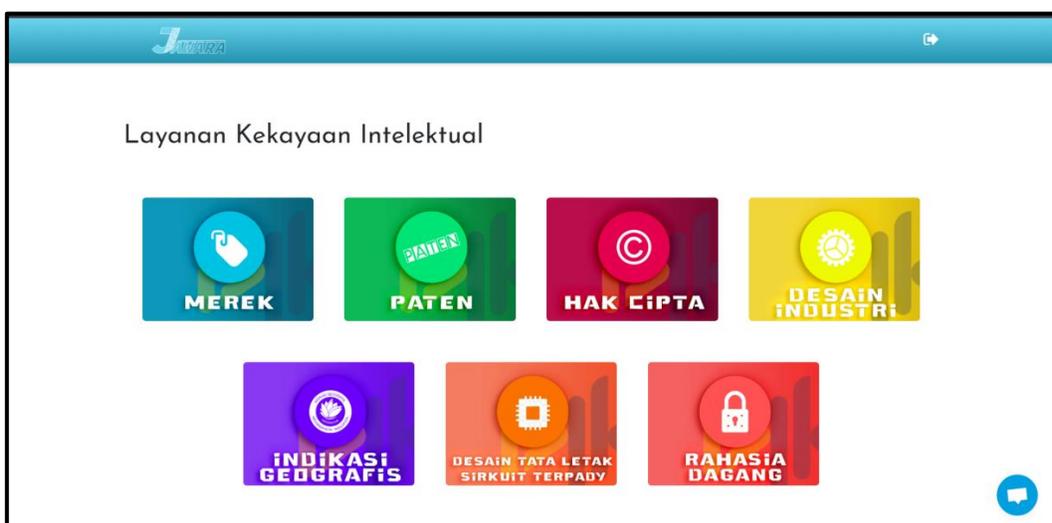
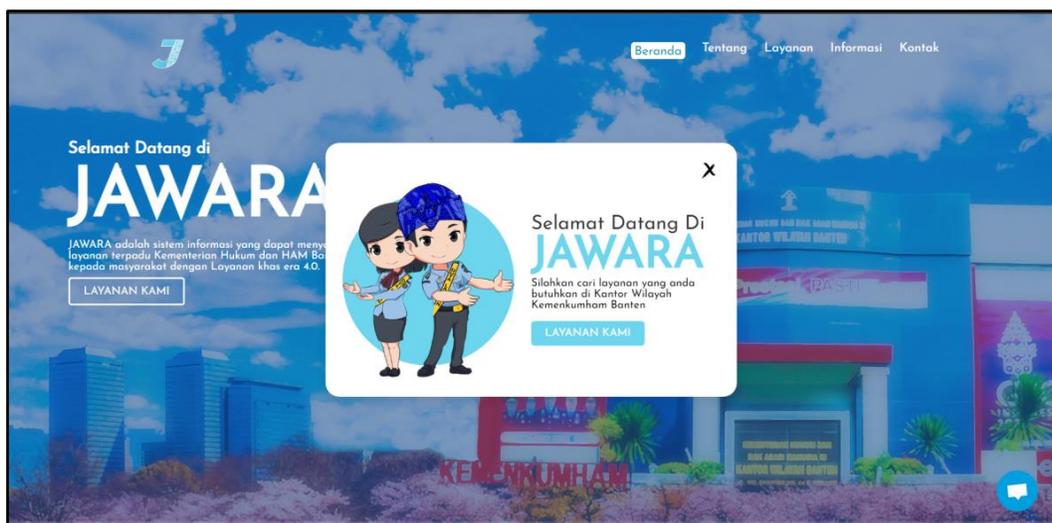
- a. Jawa.kemenkumham.go.id

Jawara merupakan sistem informasi yang dapat menyampaikan informasi layanan terpadu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berbasis web Jawa

kepada masyarakat. Layanan khas era 4.0 ini dapat diperoleh hanya dengan memilih fitur yang diinginkan pada aplikasi Sijawara. Untuk semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan, Kemenkumham Banten melakukan pembaharuan aplikasi sijawara. Sesuai tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah, jenis layanan pada Sijawara terdiri atas: 1) layanan hukum dan HAM; 2) layanan keimigrasian; 3) layanan pemasyarakatan; dan 4) layanan dukungan manajemen. Fitur layanan pada sijawara meliputi:

- Profil dan Bewara;
- Informasi Layanan, menu yang memuat informasi layanan yang memuat persyaratan dan mekanisme meliputi:
 - 1) informasi layanan Kekayaan Intelektual;
 - 2) informasi pendaftaran Notaris;
 - 3) informasi permohonan kewarganegaraan;
 - 4) informasi layanan Bantuan Hukum;
 - 5) informasi permasalahan hukum dan HAM (Maskumham);
 - 6) informasi penelitian hukum dan HAM (Petalitkumham).
 - 7) Permohonan Badan Hukum dan Kekayaan Intelektual;
- Permohonan Paspor, Badan Hukum, Kekayaan Intelektual;
- Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan fitur yang memungkinkan masyarakat memberikan penilaian terhadap kualitas layanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang telah diberikan, meliputi:
 - a) kualitas pelayanan;
 - b) perilaku penyimpangan pelayanan; dan
 - c) evaluasi dan perbaikan.
- Pengaduan, merupakan fitur yang disediakan agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait layanan publik maupun perilaku petugas yang menyimpang;
- Sinorita, merupakan layanan kenotariatan yang memuat data Notaris Bante, formasi Notaris, pengaduan kinerja Notaris, laporan kinerja notaris;
- Pelantikan Notaris/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), merupakan fitur yang disediakan bagi Notaris dan PPNS yang akan dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah;
- Klinik Hukum dan HAM, merupakan media konsultasi hukum dan bantuan hukum yang memuat fitur:

- 1) majalah hukum yang terkoneksi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
 - 2) layanan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
 - 3) informasi yang memuat data organisasi/lembaga bantuan hukum (OBH/LBH) yang terverifikasi, pengaduan kinerja OBH/LBH; dan
 - 4) bantuan hukum untuk masyarakat miski.;
- Penyuluhan dan dokumen hukum, merupakan layanan penyuluhan hukum bagi seluruh instansi, perguruan tinggi, kabupaten, kota, desa, kelurahan, sekolah, atau lembaga di Banten oleh para personil penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kemenkumham banten;
 - Fasilitator Raperda, merupakan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota;
 - Cinta Produk NAPI, merupakan fitur yang menampung hasil Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan kaitan baik dari LAPAS/Rutan/Bapas;
 - Izin Penelitian, merupakan fitur yang disediakan bagi mahasiswa atau penelitian yang akan melakukan penelitian baik di Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis (LAPAS/Rutan/Bapas) dan di Kantor Imigrasi;
 - Informasi Proses Layanan Ijin Tinggal, menyediakan fitur bagi pemohon layanan keimigrasian terkait:
 - 1) Perpanjangan ITAS ke-4;
 - 2) Perpanjangan ITAS ke-5;
 - 3) Alih Status ITAS ke ITAP;
 - 4) Alih Penjamin;
 - 5) Alih ITK ke ITAP;
 - 6) Perpanjangan ITAP;
 - 7) Alih Rangkap Jabatan;
 - 8) Duplikat KITAS karena Hilang;
 - 9) Permohonan SKIM;
 - 10) Duplikat KITAP karena Hilang
 - Konsultasi Kekayaan Intelektual (KI), merupakan layanan kekayaan intelektual meliputi koreksi pendaftaran Merk, koreksi pendaftaran design industri, Paten, dan koreksi pendaftaran Hak Cipta.



b. Dashboard IT

Sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang bergerak dengan core bisnis pelayanan hukum dan HAM untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan hukum di lingkungan Provinsi Banten. Salah satunya terkait dengan informasi kenotariatan. Melalui aplikasi Dashboard IT ini diharapkan akan memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat di Wilayah Provinsi Banten yang ingin mencari tahu mengenai notaris. Sebagai contoh informasi mengenai jumlah notaris di Wilayah Provinsi Banten secara keseluruhan maupun jumlah notaris di wilayah-wilayah yang lebih kecil.

c. Teman Mager (Sistem Layanan Hukum HAM Bergerak)

Minimnya akses masyarakat di Wilayah provinsi Banten untuk memperoleh informasi mengenai layanan kekayaan intelektual, menginisiasi Kantor Wilayah Kemenkumham Banten untuk mempermudah masyarakat. Teman Mager atau Sistem Layanan Hukum dan HAM Bergerak ini dipergunakan untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi mekanisme pendaftaran kekayaan intelektual secara mandiri atau online. Dengan Teman Mager, masyarakat di Wilayah Provinsi Banten diharapkan dapat semakin mudah mendapatkan informasi terkait kekayaan intelektual.

d. Lapori!

Inovasi Lapori yang diinisiasi oleh Kemenpan RB menjadi salah satu yang turut dipergunakan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Melalui aplikasi berbasis website ini masyarakat dapat memberikan informasi/laporan/pengaduan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Banten. Adapun laporan yang diterima akan segera ditindaklanjuti oleh Kemenkumham Banten, dan hasil tindaklanjut yang dilakukan akan diinformasikan kembali kepada pelapor. Tak hanya itu, pada Lapori masyarakat juga bisa bertanya mengenai layanan yang ada di Lingkungan Kemenkumham Banten.

e. Layanan Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Sipp.Menpan.go.id :

Sebagai salah satu pemenuhan kewajiban badan publik untuk mempublikasikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang disusun sebagai salah satu komponen pelayanan publik dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) merupakan layanan informasi publik satu pintu yang berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel. Sesuai Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.HH.07.05 Tahun 2021, jenis layanan pada Kantor Wilayah meliputi:

- pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris Pengganti;
- layanan pencabutan pembebasan bersyarat;
- layanan informasi kepada media massa;
- layanan informasi kepada publik;
- konsultasi hukum;
- layanan pengaduan masyarakat;

- layanan asimilasi kategori integrasi PP 99;
- pelayanan komunikasi masyarakat;
- fasilitasi dan penanganan penegakan hukum kekayaan intelektual;
- permohonan dan pencairan bantuan hukum kekayaan intelektual;
- pengambilan sumpah/janji setia pewarganegaraan Indonesia;
- fasilitasi dan pendampingan permohonan kekayaan intelektual;
- pelantikan dan pengambilan sumpah PPN;
- permohonan pendaftaran pewarganegaraan Republik Indonesia (Naturalisasi) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
- pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris Baru/Pindah;
- Alih Sponsor/Alih Jabatan;
- Alih Status ITAS ke ITAP;
- Alih Status ITK ke ITAS;
- layanan Izin ke Luar Negeri;
- layanan pemberian Izin ke Luar Kota;
- layanan Asimilasi Kategori Integrasi PP 28;
- layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 28;
- layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- layanan Asimilasi Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 28;
- layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 99;
- layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 28;
- layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 99;
- layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 99;
- layanan Cuti Mengunjungi Keluarga Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- layanan Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Khusus Pasal 34 ayat (1) PP 99/2012;
- layanan Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 ayat (3) PP 99/2012;
- layanan Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Khusus Pasal 34 ayat (1) PP 99/2012;

- layanan Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 ayat (3) PP 28/2006;
- layanan Pemberian Perbaikan/Pencabutan Remisi;
- permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) ke Ditjen Imigrasi;
- layanan pengaduan;
- perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Negara Rawan (NR);
- perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke IV;
- perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke V;
- perpanjangan Izin Tinggal Terbatas NR (Negara Rawan);
- perpanjangan Izin Tinggal Tetap (online);
- layanan pelimpahan bimbingan klien masyarakat;
- pemindahan atas permintaan sendiri/keluarga/kuasa hukum (dalam wilayah dan antar wilayah);
- layanan permohonan izin berobat luar provinsi;
- layanan rujukan perawatan lanjutan di luar LAPAS/Rutan;
- pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda

Serta dilakukan penyebaran informasi pemberitaan yang berisikan kegiatan serta capaian kinerja Kemenkumham Banten pada website Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPPN) sehingga diharapkan masyarakat yang membuka website SIPPN dapat mengetahui kinerja yang dilakukan Kemenkumham Banten.

2. Sumber Daya Manusia

Tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berada pada Bagian Program dan Humas yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bagian, 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan 7 (tujuh) orang fungsional umum.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporrannya

Tahun 2024 anggaran Layanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berasal dari DIPA Hubungan Masyarakat, DIPA Sub Bidang Kekayaan Intelektual, dan DIPA Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kemenkumham Banten.

C. Hasil yang dicapai

1. Berdasarkan pelaksanaan informasi publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2024, berikut adalah rincian pelaksanaan informasi publik:

No.	Permohonan Informasi Publik			Keterangan
	Tanggal	Pemohon	Jenis Informasi	
1.	15 Januari 2024	Zaki Ahmadi	Permohonan Informasi Terkait Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
2.	18 Januari 2024	Marsella	Permohonan Informasi mengenai upaya banding oleh notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
3.	18 Januari 2024	Harlina	Permohonan informasi mengenai apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
4.	20 Januari 2024	No Name (0812-8328-xxx)	Permohonan Informasi terkait Paspor	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
5.	30 Januari 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
6.	03 Februari 2024	Rizky Arimazona Siregar	Menyampaikan permohonan undangan rapat koordinasi lintas sektor kementerian/lembaga	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
7.	14 Maret 2024	Anasari	Permohonan Informasi terkait Beneficial Owner	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
8.	17 Maret 2024	Vanessa Dwi	Permohonan Informasi terkait Pra Riset Skripsi	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

			terkait hak cipta karya seni	
9.	17 April 2024	Wahyu Kandacong	Permohonan mengenai informasi buka blokir AHU	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
10.	24 April 2024	Erwin	Permohonan Informasi terkait Pengecekan Merek	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
11	24 April 2024	Nanda Angela	Permohonan Informasi terkait Surat Ijin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
12.	04 Mei 2024	Callista Ling	Permohonan Informasi terkait Pewarganegaraan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
13.	10 Mei 2024	Michael Abraham	Permohonan Informasi terkait alamat Majelis Pengawas Notaris Kota Tangerang	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
14.	15 Mei 2025	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Layanan legalisir dokumen	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
15.	17 Juni 2024	Ben	Permohonan Informasi terkait pewarganegaraan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
16.	20 Juni 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait pemblokiran beneficial ownership	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
17.	15 Juli 2024	Cindy	Permohonan Informasi terkait legalisir dokumen	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
18.	19 Juli 2024	Safira	Permohonan Informasi terkait Pengajuan KKP	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
19.	20 Juli 2024	Dini Yulia Sari	Permohonan Informasi terkait SPLP Untuk orang	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

			Asing	
20.	25 Juli 2024	Fe	Permohonan Informasi terkait mendirikan PT. Perorangan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
21.	03 Agustus 2024	Aulia Dianta Putri	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan magang di UPT	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
22.	07 Agustus 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait permohonan kewarganegaraan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
23.	10 Agustus 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait pengesahan badan hukum perkumpulan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
24.	22 Agustus 2024	Reza Mangkulangit	Permohonan Informasi mengenai Apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
25.	22 Agustus 2024	Sukmariah	Permohonan Informasi terkait Ijin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
26.	23 Agustus 2024	Puspa	Permohonan Informasi terkait ijin kunjungan ke UPT	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
27.	23 Agustus 2024	Nisrina	Permohonan Informasi terkait cara perubahan PT Perseorangan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
28.	25 Agustus 2024	Octa Risandi Putra	Permohonan Informasi terkait layanan apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
29.	27 Agustus 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait tata cara pembukaan pemblokiran Beneficial Ownership	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

30.	29 Agustus 2024	Tito	Permohonan Informasi terkait cara Pelaporan Beneficial Ownershio	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
31.	01 September 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Pengisian Form PMPJ Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
32.	15 September 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Laporan Bulanan Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
33.	16 September 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Pembatalan Visa	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
34.	17 September 2024	Nihayatul Fauziah Astuti	Permohonan Informasi terkait seleksi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
35.	18 September 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Laporan Bulanan Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
36.	26 September 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait seleksi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
37.	05 Oktober 2024	Jalan Sepi 2024	Permohonan Informasi terkait Kuota Eazy Paspors	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
38.	06 Oktober 2024	Karina Leoni	Permohonan Informasi terkait seleksi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
39.	07 Oktober 2024	Yoga Permana	Permohonan Informasi terkait layanan magang	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
40.	07 Oktober 2024	Devinda Ayu Issky Nanda	Permohonan Informasi terkait seleksi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
41.	14 Oktober 2024	Khoulah Athifah	Permohonan Informasi terkait seleksi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

42.	15 Oktober 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait seleksi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
43.	16 Oktober 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait seleksi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
44.	18 Oktober 2024	Citra Aulia	Permohonan Informasi mengenai Apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
45.	23 Oktober 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait seleksi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
46.	30 Oktober 2024	Pemohon	Permohonan informasi mengenai CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
47.	03 Novermber 2024	Ayub Sucipto	Permohonan Informasi terkait barang inventaris yang dilelang	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
48.	05 November 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait status perpanjangan paspor	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
49.	15 November 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait permohonan kewarganegaraan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
50.	16 November 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait seleksi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
51.	17 November 2024	Ayu Citra Sari	Permohonan Informasi terkait layanan apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
52.	18 November 2024	Pemohon	Permohonan informasi mengenai CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
53.	20 November 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait permohonan kewarganegaraan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

54.	22 November 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait seleksi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
55.	10 Desember 2024	Pemohon	Permohonan informasi mengenai CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
56.	12 Desember 2024	Pemohon	Permohonan Informasi terkait layanan apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
57.	14 Desember 2024	Azra Aulia Rahman	Permohonan Informasi terkait cara Apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

2. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah keberatan yang diterima terkait informasi publik adalah “Nihil/tidak ada”, sehingga tidak ada rincian penyelesaian sengketa informasi publik.

3. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik :

a. Kendala Internal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Sumber Daya Manusia

Dalam kegiatan pelayanan informasi publik, petugas diambil dari perwakilan setiap bidang/bagian yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan, hal ini tentunya berdampak pada beban kerja ganda karena petugas pelayanan tentunya memiliki tugas pada bidang/bagian masing-masing yang harus diselesaikan

- Sarana dan Prasarana

Kegiatan pelayanan informasi publik membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Mulai dari alat komunikasi maupun kelengkapan sarana di Ruang Layanan, PC, dan lainnya. Selain itu, terdapat kendala berupa domain website layanan online pada satu aplikasi kanwil tidak dapat diakses oleh pengguna terkendala jaringan.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang sering terjadi pada pelaksanaan layanan informasi publik adalah, ketika pemohon meminta data misalnya terkait dengan Fidusia, atau

pemohon yang ingin bertemu langsung dengan narasumber informasi. Untuk layanan informasi fidusia secara lengkap harus dibuka melalui website yang berbayar, sehingga petugas layanan tidak dapat memberikan informasi terkait.

4. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi sangat dibutuhkan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan baik dari Sumber Daya Manusia mekanisme/prosedur layanan maupun sarana dan prasarana yang digunakan. Rekomendasi dan Tindaklanjut yang akan dilakukan antara lain :

- a. Peningkatan Kualitas SDM sebagai Petugas yang khusus melayani Informasi Publik;
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Ruang Layanan Publik;
- c. Upaya peningkatan partisipasi publik dalam Survey Indeks Kepuasan Masyarakat bagi pengguna layanan yang telah menerima layanan;
- d. Inovasi-inovasi Penyebaran Informasi Publik.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan layanan informasi pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Layanan informasi pelayanan publik telah berjalan dengan efektif dan efisien dalam memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat;
- b. Masyarakat telah menunjukkan minat yang tinggi terhadap layanan informasi pelayanan publik, seperti terlihat dari jumlah pemohon informasi yang meningkat;
- c. Layanan informasi pelayanan publik telah membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelayanan publik yang tersedia;
- d. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi pelayanan publik, seperti keterbatasan sumber daya dan anggaran di masa transisi.

2. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan layanan informasi pelayanan publik, kami memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi pelayanan publik khususnya di masa transisi yang akan dialami oleh Kementerian Hukum dan HAM Banten yang mana akan terjadi transformasi menjadi satu kementerian koordinator dan 3

kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Kementerian Hak Asasi Manusia;

- b. Mengembangkan infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi pelayanan publik yang memadai;
- c. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelayanan publik yang tersedia melalui penyebaran informasi publik baik melalui pemanfaatan *platform* digital;
- d. Mengembangkan kerja sama dengan instansi lain untuk meningkatkan efektifitas layanan informasi pelayanan publik.

Dengan demikian, diharapkan layanan informasi pelayanan publik dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

E. Penutup

Dengan demikian, Laporan Layanan Informasi Pelayanan Publik ini disampaikan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang layanan informasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2024.



Dikeluarkan di Serang
pada tanggal 19 Maret 2025

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

R. Natanegara K.P